

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2022 (Audited)

Jl. Letjen Suprpto

Banjarnegara - Jawa Tengah 53418

Telp. (0286) 592810

e-mail : pabanjarnegara@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 (Audited)

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl Letjen Suprpto, Banjarnegara

Telp. (0286) 592810

Banjarnegara - Jawa Tengah 53418

e-mail : pabanjarnegara@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Banjarnegara adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banjarnegara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2022 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Banjarnegara. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Banjarnegara, 22 Mei 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



ALI IMRON, SH.

NIP. 196804051993031002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
II. Laporan Operasional.....	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	21
V. Catatan atas Laporan Keuangan	23
A. Penjelasan Umum	23
A.1. Dasar Hukum.....	23
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Banjarnegara.....	24
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	25
A.4. Basis Akuntansi	26
A.5. Dasar Pengukuran	26
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	26
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	35
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	35
B.2. Belanja.....	36
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	41
C.1. Aset Lancar.....	41
C.2. Aset Tetap	42
C.3. Aset Lainnya	47
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	48
C.6. Ekuitas	50

D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	50
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	50
D.2.	Beban Pegawai	51
D.3.	Beban Persediaan	52
D.4.	Beban Jasa.....	52
D.5.	Beban Pemeliharaan	53
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	53
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	54
D.8.	Kegiatan Non Operasional	55
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	56
E.1.	Ekuitas Awal	56
E.2.	Surplus (defisit) LO	56
E.3.	Koreksi Aset Tetap	56
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	56
E.5.	Kenaikan / Penurunan Ekuitas	56
E.6.	Ekuitas Akhir.....	57
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	57
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	57
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	57
	Daftar dan Lampiran	60
	Rincian Nilai Perolehan Pengadilan Agama Banjarnegara.....	61
	Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual.....	64

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Banjarnegara

Jl Letjen Suprpto, Banjarnegara - Jawa Tengah 53418
Telp. (0286) 592810 e-mail : pabanjarnegara@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banjarnegara yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 (Audited) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banjarnegara telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banjarnegara, 22 Mei 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

ALI IMRON, SH.
NIP. 196804051993031002

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2022 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022 .

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 1.200.000,- atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 0.

Realisasi Belanja Negara pada Semester II TA 2022 adalah sebesar Rp. 5.930.477.273,- atau mencapai 100 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 5.935.140.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah

diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 15.482.921.958,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 6.332.550,-; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 15.476.589.408,-; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0,-.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 1.075.324,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 1.075.324,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp. 15.481.846.634,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 450.000,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 6.150.095.758,- sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 6.149.645.758,-). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp 0,- dan surplus(defisit) sebesar Rp. 381,- sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar (Rp. 6.149.645.758,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp. 15.424.016.840,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp. 6.149.645.758,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai (Rp. 2.816.471,-) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 6.210.292.023,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp. 15.481.846.634,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan

Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2022, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 DAN 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2022			TA 2021
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	1.200.000	0	600.381
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	1.200.000	0	600.381
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	4.638.168.000	4.635.718.810	100	5.479.072.268
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1.209.972.000	1.207.833.463	100	1.133.970.721
3.	Belanja Modal	B.2.3.	87.000.000	86.925.000	100	64.887.900
	Jumlah Belanja Negara		5.935.140.000	5.930.477.273	100	6.677.930.889

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA NERACA PER 31 Desember 2022 DAN 31 Desember 2021 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET			
Aset Lancar			
C.1			
Kas dan Bank			
Persediaan	C.1. 1.	6.332.550	6.763.000
Jumlah Aset Lancar		6.332.550	6.763.000
Aset Tetap			
C.2			
Tanah	C.2. 1.	10.613.780.000	10.613.780.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2.199.384.937	1.876.920.187
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	5.268.037.000	5.238.112.000
Aset Tetap Lainnya	C.2. 4.	12.180.537	12.180.537
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 5.	(2.616.793.066)	(2.316.625.114)
Jumlah Aset Tetap		15.476.589.408	15.424.367.610
Aset Lainnya			
C.4			
Aset tak Berwujud	C.4. 1.	7.400.000	7.400.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 2.	(7.400.000)	(7.400.000)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		15.482.921.958	15.431.130.610
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
C.5			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	325.324	7.113.770
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5. 2.	750.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.075.324	7.113.770
Jumlah Kewajiban		1.075.324	7.113.770
EKUITAS			

Ekuitas Dana Lancar	C.6	15.481.846.634	15.424.016.840
Jumlah Ekuitas Dana		15.481.846.634	15.424.016.840
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		15.482.921.958	15.431.130.610

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

II. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 Desember 2022 DAN 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	450.000	600.000
Jumlah Pendapatan		450.000	600.000
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	4.635.718.810	5.468.701.942
Beban Persediaan	D. 3	23.084.250	35.249.835
Beban Barang dan Jasa	D. 4	714.500.079	686.999.312
Beban Pemeliharaan	D. 5	404.374.238	358.387.448
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	59.516.900	59.419.500
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	312.901.481	301.550.808
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		6.150.095.758	6.910.308.845
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(6.149.645.758)	(6.909.708.845)
Kegiatan Non Operasional			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D. 12	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Jumlah Surplus /(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	381

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	381
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	(6.149.645.758)	(6.909.708.464)
Pos Luar Biasa	D. 13	
Beban Luar Biasa	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(6.149.645.758)	(6.909.708.464)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2022 DAN 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ekuitas Awal	E. 1	15.424.016.840	15.646.757.147
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(6.149.645.758)	(6.909.708.464)
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar		(2.816.471)	799.855
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset tetap Non Revaluasi	E. 6	(2.816.471)	799.855
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	6.210.292.023	6.686.168.302
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 9	57.829.794	(222.740.307)
Ekuitas Akhir		15.481.846.634	15.424.016.840

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada

Bagan Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Banjarnegara

Visi Pengadilan Agama Banjarnegara adalah **“Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarnegara Yang Agung”**

Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Banjarnegara menetapkan **misi** yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Menyelenggarakan Peradilan yang bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
4. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Banjarnegara melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarnegara yang berwawasan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

2. Terwujudnya sistim pengelolaan perkara yang baik dalam rangka pelayanan kepada pencari keadilan atas dasar asas cepat, sederhana dan biaya ringan
3. Terwujudnya tertib penyelenggaraan administrasi perkara sesuai pola bindalmin
4. Terwujudnya aparatur Pengadilan Agama yang berkapasitas optimal dan mutu kerja yang maksimal dan tata laksana kepegawaian yang tertib.
5. Terwujudnya Peningkatan kualitas kerja dan motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas.
6. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kantor barang inventaris milik negara.
7. Terwujudnya Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pencari keadilan.
8. Terwujudnya tata kelola tata persuratan dan keuangan yang efektif dan efisien yang mampu terlaksananya kegiatan operasional kantor.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Banjarnegara adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan

hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp (*nol rupiah*);

- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 0 (*nol rupiah*);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak

Berwujud, dan Aset Lain-lain.

- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8.) Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none">1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9.) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

(10.) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2022 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2021 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh

penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2022.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp.
1.200.000*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 1.200.000,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Banjarnegara adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0,00
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1.200.000	0,00
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
4.	Penerimaan Kembali Persekot / Uang Muka Gaji	0	0	0,00
5.	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Barang	0	0	0,00
6.	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	0	0	0,00
Total Pendapatan		0	1.200.000	0,00

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 600.000,- atau 100,00 persen dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan karena adanya pembayaran sewa sekaligus selama 2 tahun anggaran yang dilakukan oleh Penyewa.

Perbandingan realisasi PNBPN TA 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2022	TA 2021	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	0	0	0	0,00
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.200.000	600.381	599.619	99,87
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0,00
4.	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0	0	0	0,00
5.	Penerimaan Kembali Persekot / Uang Muka Gaji	0	0	0	0,00
6.	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	0	0	0	0,00
Total Pendapatan		1.200.000	600.381	599.619	99,87

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara : Rp.
5.930.477.273,-*

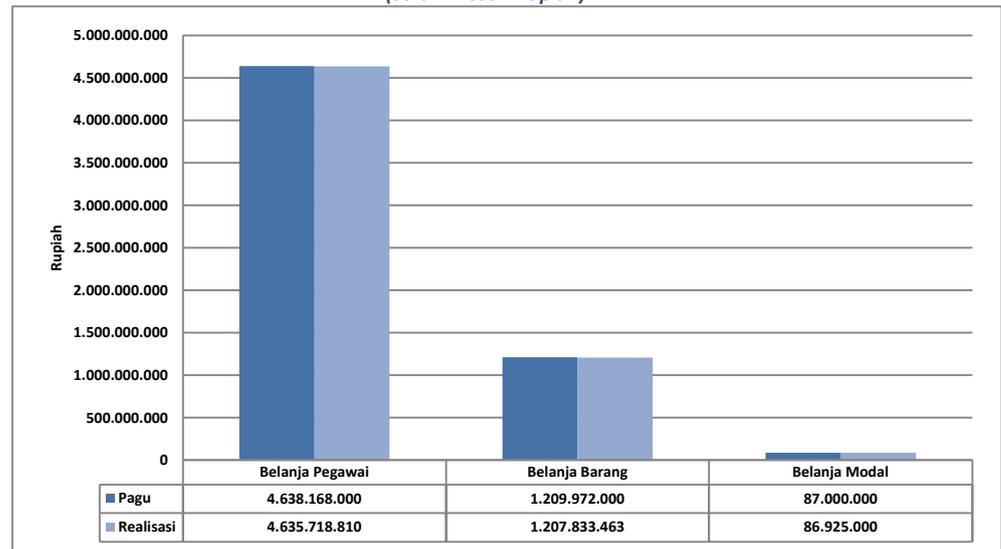
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Banjarnegara per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 5.930.477.273,- setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 100 % dari anggaran senilai Rp. 5.935.140.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Semester II TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2022		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	4.638.168.000	4.635.718.810	100
Belanja Barang	1.209.972.000	1.207.833.463	100
Belanja Modal	87.000.000	86.925.000	100
Total Belanja Bruto	5.935.140.000	5.930.477.273	100
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	5.935.140.000	5.930.477.273	100

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2022
(dalam ribuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) 2022

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp. -747.453.616,- atau sebesar -12,60 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya penurunan PAGU anggaran tahun 2022;

Perbandingan realisasi belanja Semester II TA 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2022 dan 31 Desember TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2022	31 Desember 2021	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	4.635.718.810	5.479.072.268	(843.353.458)	(15,39) %
Belanja Barang	1.207.833.463	1.133.970.721	73.862.742	6,51 %
Belanja Modal	86.925.000	64.887.900	22.037.100	33,96 %
Total Belanja	5.930.477.273	6.677.930.889	(747.453.616)	(-11,19) %

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp.
4.635.718.810*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara per 31 Desember TA 2022 dan 31 Desember TA 2021 adalah sebesar Rp. 4.635.718.810,- dan Rp. 5.479.072.268,-.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 mengalami penurunan sebesar (18,19) persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2021. Hal ini disebabkan karena penurunan jumlah pegawai khususnya Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2022 dan 31 Desember TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1.574.983.260	1.659.404.480	(84.421.220)	(5,09) %
Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.661	18.451	2.210	11,98 %
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	117.180.546	122.590.930	(5.410.384)	(4,41) %
Belanja Tunj. Anak PNS	21.133.316	29.367.602	(8.234.286)	(28,04) %
Belanja Tunj. Struktural PNS	38.700.000	34.380.000	4.320.000	12,57 %
Belanja Tunj. Fungsional PNS	2.244.780.000	2.890.115.000	(645.335.000)	(22,33) %
Belanja Tunj. PPh PNS	324.685.213	420.172.797	(95.487.584)	(22,73) %
Belanja Tunj. Beras PNS	69.161.100	72.782.100	(3.621.000)	(4,98) %
Belanja Uang Makan PNS	232.250.000	240.171.000	(7.921.000)	(3,30) %
Belanja Tunjangan Umum PNS	13.195.000	10.440.000	2.755.000	26,39 %
Total Belanja Brutto	4.636.089.096	5.479.442.360	(843.353.264)	(15,39) %
Pengembalian Belanja	370.286	370.092	194	0,05 %
Total Belanja Netto	4.635.718.810	5.479.072.268	(843.353.458)	(15,39) %

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang : Rp.
1.441.606.903*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Banjarnegara per 31 Desember TA 2022 dan 31 Desember TA 2021 adalah sebesar Rp. 1.441.606.903,- dan Rp. 790.077.290,-.

Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 3,81 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2021. Hal ini disebabkan karena adanya perencanaan yang lebih

baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga realisasi belanja lebih besar dari sebelumnya.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2022 dan 31 Desember TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Persediaan	28.239.650	29.972.600	(1.732.950)	(5,78) %
Belanja Barang dan Jasa	536.023.050	508.546.699	27.476.351	5,40 %
Belanja Barang dan Jasa Non Operasional	4.649.700	1.538.000	3.111.700	202,32 %
Belanja Pemeliharaan	398.788.388	358.237.448	40.550.940	11,32 %
Belanja Perjalanan Dinas	59.626.900	59.419.500	207.400	0,35 %
Belanja Langganan Daya dan Jasa	180.615.775	176.256.474	4.359.301	2,47 %
Total Belanja Brutto	1.441.606.903	1.133.970.721	307.636.182	27,13 %
Pengembalian Belanja	110.000	0	110.000	100 %
Total Belanja Netto	1.207.833.463	1.133.970.721	73.862.742	6,51 %

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja
Modal :Rp.
86.925.000,-

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Banjarnegara per 31 Desember TA 2022 dan 31 Desember TA 2021 adalah sebesar Rp. 86.925.000,- dan Rp. 64.887.900,-.

Realisasi Belanja Modal TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 25,35 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2021. Hal ini disebabkan karena Kenaikan pagu belanja modal TA 2022 di Pengadilan Agama Banjarnegara.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2022 dan 31 Desember TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	57.000.000	64.887.900	(7.887.900)	(12,16) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.925.000	0	29.925.000	100,00 %
Total Belanja Brutto	86.925.000	64.887.900	22.037.100	33,96 %
Pengembalian Belanja	0	0	-	0
Total Belanja Netto	86.925.000	64.887.900	22.037.100	33,96 %

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp. 6.332.550

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.332.550 dan Rp. 6.763.000.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Banjarnegara per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Persediaan	6.332.550	6.763.000
Persediaan Belum diregister	0	0
Total Aset Lancar	6.332.550	6.763.000

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp. 0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0

Jumlah

0

0

C.1.2. Persediaan

*Persediaan:
Rp. 6.332.550*

Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.332.550 dan Rp. 6.763.000,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Barang Konsumsi	5.317.400	6.763.000
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	1.015.150	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		6.332.550	6.763.000

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap :
Rp.
15.476.589.408*

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji sebesar Rp. 15.585.439.408,- dan Rp. 15.424.367.610,- Aset Tetap yang tersaji merupakan aset

berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2022	TA 2021	Perubahan
1	Tanah	10.613.780.000	10.613.780.000	-
2	Peralatan dan Mesin	2.199.384.937	1.876.920.187	322.464.750
3	Gedung dan Bangunan	5.268.037.000	5.238.112.000	29.925.000
5	Aset Tetap Lainnya	12.180.537	12.180.537	-
	Jumlah	18.093.382.474	17.740.992.724	352.389.750
	Akumulasi Penyusutan	(2.616.793.066)	(2.316.625.114)	(300.167.952)
	Nilai Buku Aset Tetap	15.476.589.408	15.424.367.610	52.221.798

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp.
10.613.780.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 10.613.780.000,- dan Rp. 10.613.780.000,-.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	1	3.000	11.28.06.19.4 .00016	Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI	Pengadilan Agama Banjarneegara	9.733.050.000
2.	2	496	005	Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI	Pengadilan Agama Banjarneegara	675.701.000
3.	1	180	11.28.06.12.4 .00011	Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI	Pengadilan Agama Banjarneegara	205.029.000
Jumlah						10.613.780.000

Tidak terdapat Perubahan Pada Nilai Aset Tanah Pengadilan Agama Banjarnegara.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp.
2.199.384.937*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.323.784.937 dan Rp. 1.876.920.187.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	1.876.920.187
Mutasi Tambah	473.864.750
Pembelian	57.000.000
Transfer Masuk	389.864.750
Reklasifikasi Masuk	27.000.000
Mutasi Kurang	(151.400.000)
Transfer Keluar	(124.400.000)
Reklasifikasi Keluar	(27.000.000)
Saldo per 31 Desember 2022	2.199.384.937
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	(1.859.409.067)
Nilai Buku 31 Desember 2022	339.975.870

Mutasi tambah Aset tetap Peralatan dan Mesin pada Tahun 2022 sebesar Rp. 339.975.870,- yang berasal dari pengadaan belanja modal peralatan dan mesin, transfer masuk aset dari BUA Mahkamah Agung RI serta adanya reklasifikasi aset sebagai akibat kesalahan pencatatn aset dimana rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp.
5.268.037.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 5.268.037.000,- dan Rp. 5.238.112.000.-

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	5.238.112.000
Mutasi Tambah	89.775.000
Reklasifikasi Masuk	29.925.000
Penyelesaian Pembangunan Langsung	29.925.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	29.925.000
Mutasi Kurang	(59.850.000)
Reklasifikasi Keluar	(29.925.000)
Koreksi Pencatatan	(29.925.000)
Saldo per 31 Desember 2022	5.268.037.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	(757.383.999)
Nilai Buku 31 Desember 2022	4.510.653.001

Terdapat mutasi baik mutasi tambah maupun mutasi kurang pada aset gedung dan bangunan sebesar akumulasi total 29.925.000 yang disebabkan karena kesalahan pencatatan dan koreksi atas pencatatan penambahan nilai aset gedung dan bangunan.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp.
0,-*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	0
Mutasi Tambah	0
	0
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi	0
Saldo per 31 Desember 2022	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	0
Nilai Buku 31 Desember 2022	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp.
12.180.537*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 12.180.537 dan Rp. 12.180.537.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	12.180.537
Mutasi Tambah	
Monografi	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2022	12.180.537
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	0
Nilai Buku 31 Desember 2022	12.180.537

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp.
(2.616.793.066,-)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp (2.616.793.066,-) dan Rp. (2.316.625.114,-).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2022 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	10.613.780.000	0	10.613.780.000
2	Peralatan dan Mesin	2.199.384.937	1.859.409.067	339.975.870
3	Gedung dan Bangunan	5.268.037.000	757.383.999	4.510.653.001
4	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan	0	0	0
5	Konstruksi alam Pekerjaan	0	0	0
6	Aset Tetap Lainnya	12.180.537	0	12.180.537
	Jumlah	18.093.382.474	2.616.793.066	15.476.589.408

Aset Lainnya:
Rp. 0

C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp 0,-. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Rincian Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Aset tak Berwujud	7.400.000	7.400.000
2	Aset Lain-lain	0	0
	Nilai perolehan Aset Lainnya	7.400.000	7.400.000
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(7.400.000)	(7.400.000)
	Nilai buku Aset Lainnya	0	0

Mutasi nilai Aset Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	7.400.000
Mutasi Tambah	
Reklas Masuk	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2022	7.400.000

Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	(7.400.000)
Nilai Buku 31 Desember 2022	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.4.1. Aset tak berwujud

*Aset tak
Berwujud :
Rp. 7.400.000*

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 7.400.000 dan Rp. 7.400.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian ATB per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset tak Berwujud (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	Anti Virus	4.900.000
2.	Windows Server	2.500.000
Jumlah Total		7.400.000

Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Banjarnegara berupa software dan anti virus yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp. 1.075.324*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.075.324 dan Rp. 7.113.770. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Banjarnegara per 31 Desember 2022 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021
Pendapatan diterima di muka	750.000	0
Utang Kepada Pihak Ketiga	325.324	7.113.770
Jumlah	1.075.324	7.113.770

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada
Pihak Ketiga:
Rp. 325.324

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 325.324 dan Rp. 7.113.770. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Agama Banjarnegara per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.	Hutang Kepada Pihak Ketiga	325.324	
	Jumlah	325.324	

C.5.2. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka
dari KPPN:
Rp. 0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

Ekuitas:
Rp.
15.590.696.634

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 15.481.846.634 dan Rp 15.424.016.840. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 31 Desember 2022 terdapat kenaikan nilai kewajiban dan ekuitas sebesar Rp. 57.829.794 (0,37) dari nilai per 31 Desember 2021. Jumlah nilai Kewajiban dan ekuitas pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.15.481.846.634, sedangkan per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp. 15.424.016.840.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
Pnbp : Rp.
450.000

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 450.000,- dan Rp. 600.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Desember 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0,00
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	450.000	0,00
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
4.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
5.	Penerimaan Kembali Persekot / Uang Muka Gaji	0	0	0,00
6.	Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	0	0	0,00
	Total Pendapatan	0	450.000	0,00

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
: Rp.
4.635.718.810

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.635.718.810 dan Rp. 5.468.701.942. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2022 dan 31 Desember TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.574.983.260	1.658.109.080	(83.125.820)	(5,01) %
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(286)	(92)	(194)	210,87 %
Beban Pembulatan Gaji PNS	20.661	18.451	2.210	11,98 %
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	117.180.546	122.461.390	(5.280.844)	(4,31) %
Beban Tunj. Anak PNS	21.133.316	29.341.694	(8.208.378)	(27,98) %
Beban Tunj. Struktural PNS	38.700.000	34.380.000	4.320.000	12,57 %
Beban Tunj. Fungsional PNS	2.244.780.000	2.882.915.000	(638.135.000)	(22,14) %
Beban Tunj. PPh PNS	324.685.213	418.453.319	(93.768.106)	(22,41) %
Beban Tunj. Beras PNS	69.161.100	72.782.100	(3.621.000)	(4,98) %
Beban Uang Makan PNS	232.250.000	240.171.000	(7.921.000)	(3,30) %
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	(370.000)	(370.000)	-	0,00 %
Beban Tunjangan Umum PNS	13.195.000	10.440.000	2.755.000	26,39 %
Total Beban Pegawai	4.635.718.810	5.468.701.942	(832.983.132)	(15,23) %

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan :
Rp. 23.084.250*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 23.084.250 dan Rp. 35.249.835. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	23.084.250	35.249.835	(12.165.585)	(34,51) %
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	23.084.250	35.249.835	(12.165.585)	(34,51) %

D.4. Beban Jasa

*Beban Jasa :
Rp.
714.500.079.*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 714.500.079 dan Rp. 686.999.312 Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 31 Desember 2022 dan 31 Desember TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	445.461.600	404.663.959	40.797.641	10,08 %
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.799.250	1.126.500	672.750	59,72 %
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	49.800.000	42.600.000	7.200.000	16,90 %
Beban Barang Operasional Lainnya	38.962.200	60.156.240	(21.194.040)	(35,23) %

Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	4.649.700	0	4.649.700	100,00 %
Beban Langganan Listrik	78.180.053	74.903.819	3.276.234	4,37 %
Beban Langganan Telepon	2.335.736	2.617.454	(281.718)	(10,76) %
Beban Langganan Air	1.549.640	1.643.340	(93.700)	(5,70) %
Beban Sewa	86.641.900	97.750.000	(11.108.100)	(11,36) %
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	5.120.000	1.538.000	3.582.000	232,90 %
Total Beban Jasa	714.500.079	686.999.312	27.500.767	4,00 %

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan: Rp. 404.374.238

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 404.374.238,- dan Rp. 358.387.448,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember TA 2021 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	253.939.250	221.578.972	32.360.278	14,60 %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2.025.000	18.437.598	(16.412.598)	(89,02) %
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	142.824.138	118.220.878	24.603.260	20,81 %
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	5.585.850	150.000	5.435.850	3623,90 %
Total Beban Pemeliharaan	404.374.238	358.387.448	45.986.790	12,83 %

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas : Rp. 59.516.900.

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 59.516.900 dan Rp. 59.419.500. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	56.326.900	54.359.500	1.967.400	3,62 %
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	(110.000)	0	(110.000)	100,00 %
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	3.300.000	5.060.000	(1.760.000)	(34,78) %
Total Beban Perjalanan Dinas	59.516.900	59.419.500	97.400	0,16 %

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp. 312.901.481

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 312.901.481 dan Rp 301.550.808. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	161.424.680	150.778.125	10.646.555	7,06%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	151.476.801	150.772.683	704.118	0,47%
Jumlah Penyusutan	312.901.481	301.550.808	11.350.673	3,76%
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0,00%
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0,00%
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0,00%
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	312.901.481	301.550.808	11.350.673	3,76%

D.8. Kegiatan Non Operasional

Surplus (defisit)
Kegiatan Non
Operasional :
Rp. 0

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	-	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			-	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	(381)	381	100,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0	0	-	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	-	0,00
Pendapatan pelunasan Piutang Non bendahara	0	0	-	0,00
Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya			-	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	-	0,00
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	(381)	381	100,00

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing
Rp.
15.424.016.840 sebesar Rp. 15.424.016.840 dan Rp. 15.646.757.147.

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit) Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember
LO : Rp.
(6.149.645.758) 2021 adalah sebesar (Rp. 6.149.645.758) dan (Rp. 6.909.708.464). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Aset Tetap

Koreksi Aset Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan
Tetap : Rp.
(2.816.471) kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. (2.816.471) dan Rp. 799.855. Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai asset non revaluasi.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31
Entitas : Rp.
6.210.292.023 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.210.292.023 dan Rp. 6.686.168.302

E.5. Kenaikan / Penurunan Ekuitas

Kenaikan / Kenaikan / Penurunan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31
Penurunan
Ekuitas : Rp.
166.679.794 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 57.829.794 dan Rp. (222.740.307).

E.6. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir : Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
Rp.
15.481.846.634 adalah masing-masing sebesar Rp. 15.481.846.634 dan Rp 15.424.016.840,-

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang perlu ditindaklanjuti.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Terdapat Pendapatan dan Belanja Secara Akrual di Pengadilan Banjarnegara pada Semester II Tahun Anggaran 2022, yaitu Sewa dibayar dimuka untuk sewa atas sebagian tanah yang dijadikan untuk kantin dengan nominal sebesar Rp. 750.000,-

F.2.3. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pada Semester II Tahun Anggaran 2022 terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Rp. 0.

F.2.4. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Banjarnegara adalah:

- 1) BRI KC Jakarta Veteran A/C 653254011061000 a.n. BPG PA BANJARNEGARA 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.0.

- 2) BRI A/C 651544011071000 a.n. BPG 164 PA Banjarnegara 04 yang digunakan sebagai Penampung DIPA DIRJEN BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.0.
- 3) Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banjarnegara A/C 18 000 000 48 a.n. RPL 164 PA Banjarnegara Utk PDT yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak Ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 103.717.500,-

F.2.5. Revisi DIPA dan POK

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Revisi I tanggal 14 Maret 2022 berupa revisi halaman III DIPA
- 2) Revisi II tanggal 15 Juli 2022 berupa revisi halaman III DIPA
- 3) Revisi III tanggal 8 Oktober 2022 berupa revisi halaman III DIPA
- 4) Revisi IV tanggal 14 November 2022 berupa revisi halaman III DIPA
- 5) Revisi V tanggal 29 November 2022 berupa revisi halaman III DIPA
- 6) Revisi VI tanggal 28 Desember 2022 berupa revisi halaman III DIPA

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat ralat SPM, SP2D, SSBP maupun SSPB di Pengadilan Agama Banjarnegara pada Semester II TA 2022.

DAFTAR DAN LAMPIRAN

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Banjarnegara
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2022

No.	Aset Tetap	Volume	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A.	Peralatan dan Mesin	459	2.199.384.937	1.859.409.067	339.975.870
1.	Stationary Generating Set	1	99,449,850	99.449.850	0
2.	Tandu Lipat	1	2,500,000	178.571	2.321.429
3.	Station Wagon	3	315,333,234	315.333.234	0
4.	Sepeda Motor	5	69,555,000	69.555.000	0
5.	Mesin Fotocopy Lainnya	1	19,250,000	19.250.000	0
6.	Lemari Kayu	11	29,295,000	26.595.000	2.700.000
7.	Rak Besi	8	994	994	0
8.	Rak Kayu	1	226	226	0
9.	Filing Cabinet Besi	6	2,071,000	2.071.000	0
10.	Brandkas	2	6,501,000	6.501.000	0
11.	Buffet	2	59,500,000	59.500.000	0
12.	CCTV - Camera Control Television System	1	15,950,000	15.950.000	0
13.	Papan Visual/Papan Nama	13	1,004,000	1.004.000	0
14.	Globe	1	1	01	0
15.	Meja Kerja Kayu	56	89,929,200	89.929.200	0
16.	Kursi Besi/Metal	115	150,358,300	145.813.300	4.545.000
17.	Kursi Kayu	25	20,935,000	20.935.000	0
18.	Sice	7	45,781,500	45.781.500	0
19.	Meja Rapat	2	25,501,000	25.501.000	0
20.	Meja Komputer	2	1,077,000	1.077.000	0
21.	Meja Resepsionis	2	19,992,000	19.992.000	0
22.	Gantungan Jas	1	1	01	0
23.	Meubelair Lainnya	2	11,650,000	11.650.000	0
24.	Jam Elektronik	9	446	446	0
25.	A.C. Sentral	2	32,230,000	32.230.000	0
26.	A.C. Split	13	68,412,084	68.412.084	0

27.	Kipas Angin	4	240	240	0
28.	Televisi	3	22,578,400	22.578.400	0
29.	Amplifier	1	1	01	0
30.	Loudspeaker	5	42,137,000	4.574.600	37.562.400
31.	Lambang Garuda Pancasila	4	1,002,000	1.002.000	0
32.	Tiang Bendera	2	1,400,000	1.400.000	0
33.	Kaca Hias	8	60	60	0
34.	Palu Sidang	2	1,000,000	1.000.000	0
35.	Lambang Instansi	1	4,732,214	4.732.214	0
36.	Bracket Standing Peralatan	3	5,282,420	3.342.362	1.940.058
37.	Audio Mixing Console	1	16,483,500	1.648.350	14.835.150
38.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	8	35,447,520	31.475.652	3.971.868
39.	LCD Monitor	1	10,644,900	1.064.490	9.580.410
40.	Camera Conference	1	25,518,900	2.551.890	22.967.010
41.	Teropong/Keker	1	26	26	0
42.	Pesawat Telephone	2	2	02	0
43.	Facsimile	1	1,008,000	1.008.000	0
44.	Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	1	6,000,000	6.000.000	0
45.	Kursi Dorong	1	2,800,000	280	2.520.000
46.	Walker Polding	1	2,400,000	240	2.160.000
47.	Alat Kedokteran Lainnya	4	4,250,000	425	3.825.000
48.	Komputer Jaringan Lainnya	2	45,230,000	29.305.000	15.925.000
49.	P.C Unit	36	437,309,615	291.527.070	145.782.545
50.	Laptop	24	291,447,000	229.607.000	61.840.000
51.	Hard Disk	1	1,100,000	1.100.000	0
52.	CPU (Peralatan Personal Komputer)	10	40,771,500	40.771.500	0
53.	Monitor	10	6,108,000	6.108.000	0
54.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	19	37,354,500	29.854.500	7.500.000
55.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	26,743,050	26.743.050	0
56.	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	3	54	54	0
57.	Server	1	35,722,250	35.722.250	0

58.	Router	1	6,300,000	6.300.000	0
59.	Alat Tenis Meja	1	288	288	0
B.	Gedung dan Bangunan	6	5.268.037.000	757.383.999	4.510.653.001
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	4,190,520,000	493,002,351	3,697,517,649
2.	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	1	361,036,000	56,411,875	304,624,125
3.	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	1	43,300,000	4,920,451	38,379,549
4.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	65,431,000	10,223,590	55,207,410
5.	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	2	607,750,000	192,825,732	414,924,268
C.	Tanah	3.855	10.613.780.000	0	10.613.780.000
1.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	855	880.730.000	0	880.730.000
2.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.000	9.733.050.000	0	9.733.050.000
D.	Aset Tetap Lainnya	91	12.180.537	0	12.180.537
1.	Monografi	91	12.180.537	0	12.180.537
JUMLAH			18.093.382.474	2.616.793.066	15.476.589.408

B. INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

